



**BUPATI KEDIRI**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**

**NOMOR : 188.45/345/418.08/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**KETIGA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 15 - 08 - 2017

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KE  
NOMOR : 188.45/345/418.08/  
TANGGAL : 15 - 08 - 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Tujuan : Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan berbagai bidang.

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - g. Pembinaan UPTD;
  - h. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	<p>Jumlah rumah tangga atau KK yang terlayani air bersih</p> <p>Jumlah KK di Kab. Kediri</p> <p>X 100%</p>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	<p>1. Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni</p> <p>2. Persentase PJU dalam kondisi baik</p>	<p>Jumlah KK yang memiliki rumah layak huni</p> <p>Jumlah KK di Kab.</p> <p>X 100%</p> <p>Jumlah PJU dalam kondisi baik dan menyala</p> <p>Jumlah PJU yang ada</p> <p>X 100%</p>	
	<p>3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi</p> <p>4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani</p>	<p>Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi</p> <p>Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada</p> <p>X 100%</p> <p>Luas kawasan kumuh yang ditangani</p>	

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

